

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Rencana strategi Kecamatan Karanganyar Tahun 2010-2015 (selanjutnya di sebut Renstra Kecamatan Karanganyar) pada dasarnya dilatarbelakangi oleh keinginan untuk menjalankan amanat yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta untuk turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purbalingga Tahun 2010-2015. Untuk itu dalam rangka melaksanakan tugas sesuai dengan fungsi yang dimiliki Kecamatan Karanganyar, maka disusunlah Renstra Kecamatan Karanganyar sebagai satu bagian yang utuh dari manajemen kerja di lingkungan Pemerintah. Renstra Kecamatan Karanganyar memuat gambaran keadaan yang ingin dicapai dalam melaksanakan tugas yang diformulasikan dalam bentuk pernyataan visi, misi hingga strategi yang akan dijalankan selama kurun waktu 5 tahun kedepan 2010-2015.

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud Penyusunan Renstra Kecamatan Karanganyar dimaksud untuk menyediakan tolokukur dan alat bantu bagi unit-unit kerja yang ada pada lingkungan kecamatan Karanganyar untuk secara konsekuen dan konsisten menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan fungsi dan peran yang diemban.

Tujuan Penyusunan Renstra Kecamatan Karanganyar bertujuan untuk lebih memantapkan terselenggaranya kegiatan mengutamakan skala prioritas pada Kecamatan Karanganyar dalam upaya turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam RPJM Daerah Tahun 2010-2015.

1.3. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. PP No. 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;

7. PP No. 8 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 8. PP No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
 9. PP No. 19 Tahun 2010 tentang Kecamatan;
 10. Permendagri No. 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
 11. SKB Meneg. PPN/ Kepala Bappenas dan Mendagri No. 0008/ M.PPN/ 01/ 2007/ 050/ 264A/ SJ Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Musrenbang.
 12. Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 13. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No.050/2020/SJ Tanggal Agustus 2005 tentang Petunjuk Penyusunan Dokumen RPJP Daerah dan RPJM Daerah.
 14. Perda Kabupaten Purbalingga No. 18 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan.
 15. Perda Kabupaten Purbalingga No. 6 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purbalingga.
 16. Peraturan Bupati Purbalingga No. 59 Tahun 2011 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2012.
- 1.4. Kedudukan dan Peranan Renstra SKPD dalam Perencanaan Daerah
- Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 mengatur tentang peranan dan tanggung jawab Kepala SKPD dalam menyiapkan Renstra SKPD, keterkaitan visi dan misi Kepala Daerah Terpilih dan Renstra SKPD ini akan dijadikan pedoman bagi penyusunan Renja SKPD. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 walaupun tidak mengatur secara eksplisit mengenai Renstra SKPD, namun Undang-Undang ini mengatur peranan dan kedudukan RKPD yang merupakan penjabaran RPJMD dan Renstra SKPD dalam kaitannya dengan perumusan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Renja SKPD, RKA SKPD dan RAPBD. Undang-Undang ini menekankan penganggaran berbasis kinerja (Performance Budgeting) serta prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang meliputi akuntabilitas, profesionalitas, proporsionalitas keterbukaan dalam pengelolaan keuangan dan pemeriksaan keuangan oleh Badan Pemeriksa yang bebas dan mandiri. Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 seperti hal Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tidak mengatur secara langsung Renstra SKPD, namun mengatur tentang peranan dan kedudukan RKPD, Renja SKPD, RKA SKPD dan APBD yang merupakan penjabaran dari RPJMD dan Renstra SKPD. Ini menunjukkan tentang perlunya Renstra SKPD yang harus menggambarkan target capaian kinerja

pembangunan daerah sehingga mudah untuk ditransformasikan kedalam rencana tahunan (RKPD).

1.5. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Maksud dan Tujuan

1.3. Landasan Hukum

1.4. Kedudukan dan Peranan Renstra SKPD dalam Perencanaan Daerah

1.5. Sistematika Penulisan

BAB II TUGAS POKOK DAN FUNGSI

2.1. Struktur Organisasi

2.2. Susunan Kepegawaian dan Kelengkapan

2.3. Tugas Pokok dan Fungsi

BAB III PROFIL KINERJA PELAYANAN KECAMATAN

KARANGANYAR

3.1. Kinerja Pelayanan Masa Kini

3.2. Kelemahan dan Kekuatan Internal

3.3. Peluang dan Tantangan Eksternal

3.4. Rumusan Permasalahan Strategis Yang Dihadapi Masa Kini

3.5. Rumusan Perubahan, Kecenderungan Masa Depan yang Berpengaruh pada Tugas Pokok dan Fungsi

3.6. Rumusan Perubahan Internal dan Eksternal yang Perlu Dilakukan.

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. Visi

4.2. Misi

4.3. Tujuan

4.4. Strategi

4.5. Kebijakan

BAB V PERENCANAAN STRATEGIS

BAB VI PENUTUP

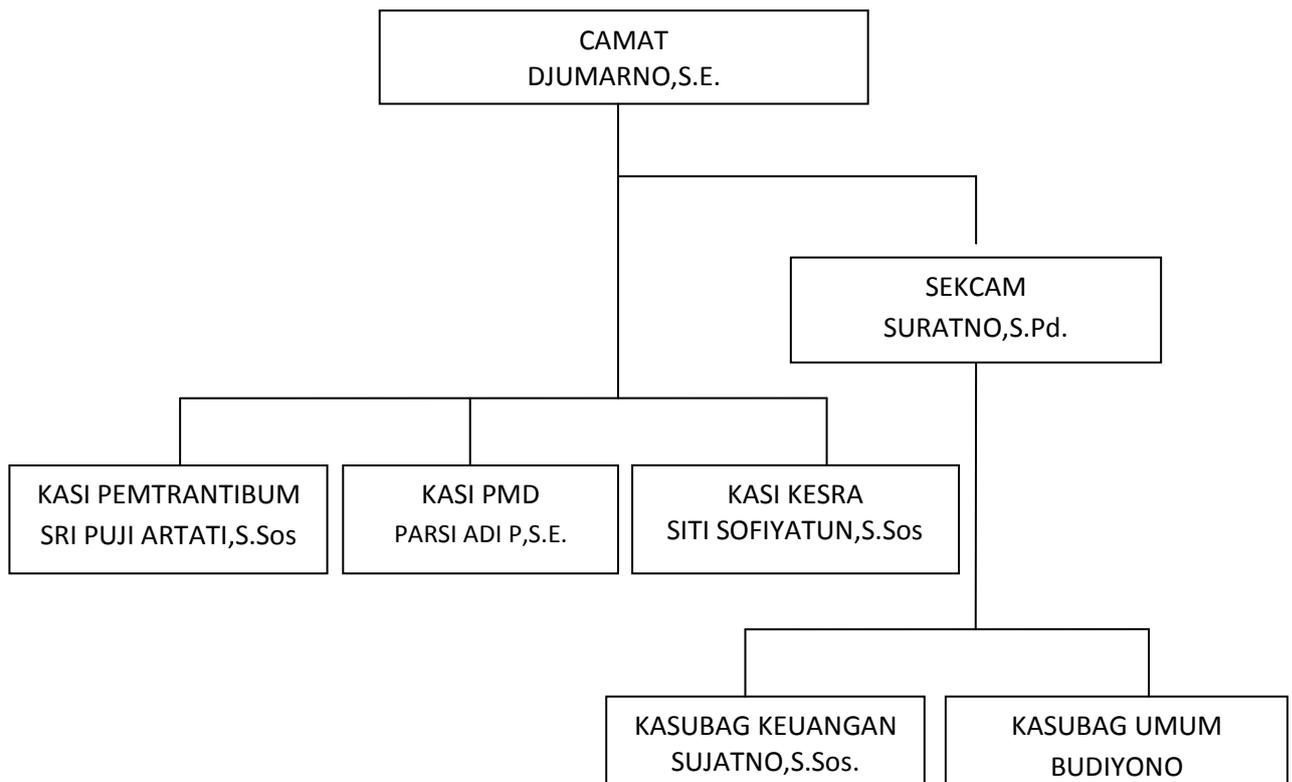
BAB II TUGAS POKOK DAN FUNGSI

2.1. Struktur Organisasi

Susunan kepegawaian Kecamatan Karanganyar mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 18 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Kecamatan, terdiri dari :

- a. Camat
- b. Sekcam
- c. Seksi Pemtrantibum
- d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- e. Seksi Kesra
- f. Sub Bagian Keuangan
- g. Sub Bagian Umum

Sedangkan gambaran tentang bagan susunan Kecamatan Karanganyar sebagai berikut :



2.2. Susunan Kepegawaian dan Kelengkapan

Pegawai Kecamatan Karanganyar berjumlah 16 orang terdiri dari 15 PNS, dan 1 Tenaga Harian Lepas Kecamatan. Menurut golongan terdiri dari :

Golongan II	:	4 orang
Golongan III	:	9 orang
Golongan IV	:	2 orang
THL Kec.	:	1 orang

Sedang menurut tingkat pendidikan sebagai berikut :

SD	:	1 orang
SLTP	:	1 orang
SLTA	:	5 orang
D III	:	2 orang
S 1	:	7 orang

d) Inventaris Kecamatan.

Pada semester I Tahun 2011 inventaris Kecamatan mempunyai nilai sebesar Rp. 712.235.650,- yang terdiri dari :

1. Tanah (KIB A)	sebesar Rp.	0,-
2. Peralatan dan Mesin (KIB B)	sebesar Rp.	380.335.000,-
3. Gedung dan Bangunan (KIB C)	sebesar Rp.	325.565.650,-
4. Jalan, irigasi dan Jaringan (KIB D)	sebesar Rp.	0,-
5. Asset Tetap Lainnya (KIB E)	sebesar Rp.	6.335.000,-
6. Konstruksi Dalam Pengerjaan (KIB F)	sebesar Rp.	0,-

2.3. Tugas Pokok dan Fungsi

Kecamatan sebagai Satuan Kerja Pemerintah Daerah, sesuai PP Nomor 19 Tahun 2010 adalah merupakan perangkat daerah kabupaten/kota sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang memiliki wilayah tertentu dan dipimpin oleh Camat, yang dalam melaksanakan tugasnya memperoleh sebagian wewenang Bupati/walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, berkewajiban sama untuk melaksanakan amanat Instruksi Presiden Nomor 5 tahun 2004, SE Menpan Nomor SE-3/M.PAN/XII/2004 dan PP Nomor 8 Tahun 2006 tersebut.

Tugas pokok Camat sesuai PP Nomor 19 Tahun 2010 adalah sebagai penyelenggara tugas umum pemerintahan di wilayah kecamatan yang meliputi :

- a. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- b. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- c. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- d. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- e. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa
- f. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa.

Adapun tugas melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani urusan otonomi daerah meliputi aspek

- a. perijinan;
- b. rekomendasi;
- c. koordinasi;
- d. pembinaan;
- e. pengawasan;
- f. fasilitasi;
- g. penetapan;
- h. penyelenggaraan; dan
- i. kewenangan lain yang dilimpahkan

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi tersebut nampak bahwa kecamatan melaksanakan tugas dan fungsi yang sama dengan Pemerintah Kabupaten, hanya saja ruang lingkup yang lebih kecil. Tentu saja tiap kecamatan akan berbeda dalam membuat kebijakan dan pelaksanaan tugas karena karakteristik masing-masing kecamatan berbeda.

BAB III

PROFIL KINERJA PELAYANAN KECAMATAN KARANGANYAR

3.1. Kinerja Pelayanan Masa Kini

Dalam rangka meningkatkan kinerja Aparatur Kecamatan Karanganyar menuju pelaksanaan tata pemerintahan yang baik serta untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan perlu adanya Standar Pelayanan Minimal. Kinerja Pelayanan Masa Kini pada Kecamatan Karanganyar sebagai berikut :

No	jenis Pelayanan	Indikator	Waktu Penyelesaian
1	Administrasi Kependudukan		
	1) Pembuatan KTP	Terbitnya KTP	10 menit
	2) Pembuatan KK	Terbitnya KK	10 menit
	3) Surat Keterangan Pindah	Terbitnya Surat Keterangan Pindah	10 menit
	4) Legalisasi Permohonan Akta Kelahiran	Terlayaninya Permohonan Akta Kelahiran	10 menit
2	Perizinan		
	1) Rekomendasi IMB	Terlayaninya Permohonan	10 menit
	2) Rekomendasi Surat Izin Lingkungan (HO)	Terlayaninya Permohonan	10 menit
	3) Rekomendasi Surat Izin Keramaian	Terlayaninya Permohonan	10 menit
	4) Rekomendasi SIUP	Terlayaninya Permohonan	10 menit
3	Pertanahan		
	1) Pembuatan Akta-Akta Tanah	Rekomendasi Akta Tanah.	3 hari
	2) Surat Keterangan Kredit Bank	Terlayaninya permohonan	10 menit
	3) Legalisasi Surat Keterangan Ahli Waris	Terlayaninya Permohonan	10 menit
4	Legalisasi dokumen-dokumen lainnya (SKCK, Dispensasi Nikah dll)	Terlayaninya Permohonan	10 menit

3.2. Kelemahan dan Kekuatan Internal

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Karanganyar sangat dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal adalah kondisi alamiah yang dimiliki oleh SKPD Kantor Kecamatan Karanganyar dan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap usaha pencapaian tujuan organisasi. Hasil identifikasi masalah menunjukkan bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi organisasi secara internal, yakni faktor kekuatan (strength) dan faktor kelemahan (weakness) yang dapat terjabar dalam organisasi seperti berikut ini :

1. Kekuatan (Strenght)

Kekuatan organisasi pada Kantor Kecamatan Karanganyar dapat teridentifikasi sebagai berikut :

- a. Perda Kabupaten Purbalingga Nomor 18 Tahun 2010 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan.

Perda Kabupaten Purbalingga Nomor 18 Tahun 2010 merupakan dasar pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Camat dalam memimpin penyelenggaraan pemerintahan dimana salah satu fungsi/uraian tugas adalah menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan.

- b. Sumber Daya aparatur yang ada

Dukungan sumber daya yang ada pada Kantor Kecamatan Karanganyar dianggap mampu untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

- c. Fasilitas Sarana dan Prasarana Pendukung

Ketersediaan fasilitas sarana dan prasarana pendukung dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan mampu mewujudkan keserasian dan keterpaduan baik dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi hasil kegiatan pada Kantor Kecamatan Karanganyar.

2. Kelemahan (Weaknes).

Faktor internal organisasi berupa kelemahan merupakan faktor yang menjadi penghambat laju organisasi dalam mencapai tujuan. Kelemahan ini harus dapat tertangani secara strategis guna mengoptimalkan kegiatan organisasi. Beberapa Kelemahan dasar yang ada pada Kantor Kecamatan Karanganyar sebagai berikut :

a. Tingkat pengetahuan sebagian aparatur yang masih rendah

Rendahnya tingkat pengetahuan sebagian aparatur merupakan faktor penghambat dalam rangka mengoptimalkan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan. Rendahnya tingkat pengetahuan seperti kemampuan konseptual aparatur, pemanfaatan teknologi seperti kemampuan penggunaan computer masih terbatas.

b. Tingkat koordinasi yang masih rendah

Belum adanya petunjuk teknis tentang koordinasi di tingkat kecamatan. Sampai saat ini petunjuk teknis tentang koordinasi pada level kecamatan dalam konteks otonomi daerah belum ada, sehingga memberikan peluang melemahnya koordinasi yang pada akhirnya berimbas pada efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan.

c. Terbatasnya Jumlah Personil

Personil kantor kecamatan sejumlah terdiri dari Pejabat Struktural 7 (tujuh) manusia, staf ada 8 (delapan) manusia, APP 1 (satu) orang. Dari jumlah tersebut diketahui bahwa tenaga satpol PP / Piket Jaga yang mestinya paling sedikit 3 (tiga) orang hanya ada 1 (satu) orang maka kekurangan tenaga satpol PP. Sehingga permasalahan piket kantor harus diupayakan dari staf yang mestinya bukan tupoksinya. Sehingga masih membutuhkan 2 (dua) orang petugas piket sekaligus difungsikan tenaga kebersihan.

3.3. Peluang dan Tantangan Eksternal

Faktor Eksternal menyangkut kondisi yang mempengaruhi pola operasional dari SKPD Kecamatan Karanganyar yang sifatnya berasal dari luar organisasi. Berdasarkan tugas dan fungsi yang melekat pada Kantor Kecamatan Karanganyar maka seluruh kewenangan yang terkait erat dengan fungsi koordinasi dengan Kecamatan Karanganyar terkait erat dengan unit kerja lain, yang berarti bahwa seluruh permasalahan yang dapat teridentifikasi di wilayah Kecamatan Karanganyar sangat tergantung penanganannya oleh unit kerja lain. Hasil identifikasi masalah menunjukkan bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi organisasi secara eksternal, yakni peluang (opportunity) dan tantangan (threats) pada Kantor Kecamatan Karanganyar dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Peluang (Opportunity)

Peluang merupakan faktor eksternal organisasi yang mampu memberikan dampak terhadap pencapaian tujuan. Peluang tersebut dapat diidentifikasi sebagai berikut :

a. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 126 ayat 3, memberi peluang kepada pemerintah daerah khususnya pada tataran pengambil kebijakan tingkat kecamatan untuk memberdayakan penyelenggaraan pemerintahan umum yang meliputi :

- Mengorganisasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
- Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan pemerintahan dan ketertiban umum
- Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan.
- Mengkoordinasikan pemeliharaan sarana dan fasilitas pelayanan umum
- Mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan
- Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau yang belum dapat dilaksanakan oleh pemerintah desa dan kelurahan.

b. Adanya dukungan dan persepsi yang sama dari SKPD mengenai tujuan pemerintahan secara umum.

Adanya dukungan dan kesamaan persepsi antar SKPD mengenai tujuan pemerintahan yang pada dasarnya ingin meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, sehingga merupakan peluang dalam membangun komitmen dan kemauan melakukan koordinasi agar setiap pelaksanaan program dan kegiatan dapat terintegrasi dan terkoordinasi untuk mencapai tujuan pemerintahan.

2. Ancaman (Threats)

a. Kompleksitas kepentingan yang tinggi.

Adanya heterogenitas masyarakat memiliki kecenderungan tuntutan kualitas pelayanan yang cukup tinggi, disamping adanya pengaruh globalisasi dan pasar bebas memberikan kesempatan kepada warga masyarakat untuk dapat berkembang dan bersaing dalam menentukan pilihan-pilihan hidup, dan hal tersebut juga sekaligus menjadi tantangan aparatur kedepan di dalam memberikan pelayanan.

b. Sistem informasi dan komunikasi yang belum efektif

Untuk mendukung kelancaran koordinasi diperlukan system informasi dan komunikasi yang baik, namun sampai saat ini system informasi dan komunikasi tidak berjalan dengan baik mengakibatkan desa yang letaknya jauh dari ibukota kecamatan mengalami kendala mendapatkan informasi dengan cepat.

c. Masih adanya ego sektoral

Yang dimaksud ego sektoral disini adalah egoisme SKPD yang lebih mengedepankan kepentingan pelaksanaan program dan kegiatannya sendiri tanpa memperhatikan keselarasan dengan program dan kegiatan instansi lainnya, yang mengakibatkan terhambatnya program kerja SKPD lain.

3.4. Rumusan Permasalahan Strategis Yang Dihadapi Masa Kini

Berdasarkan analisa lingkungan yang berpengaruh terhadap pencapaian visi, misi, baik secara internal maupun eksternal, ada beberapa permasalahan strategis yang dihadapi masa kini, yaitu:

- a. Struktur Organisasi Perangkat Daerah yang mengalami perubahan;
- b. Pedoman pengelolaan daerah yang berubah-ubah aturan;
- c. SDM Aparatur yang ada tidak sesuai kebutuhan.
- d. Kecendrungan penurunan moralitas dan rendahnya keteladanan pimpinan di semua lapisan.
- e. Dampak krisis finansial global.
- f. Menurunnya kualitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup akibat pemanasan global dan rendahnya pemeliharaan lingkungan.
- g. Tuntutan masyarakat akan pelayanan kesehatan yang berkualitas, terjangkau dan merata.
- h. Tuntutan akan pendidikan yang berkualitas dan terjangkau di berbagai lapisan masyarakat.
- i. Adanya tuntutan terhadap ketahanan pangan yang bermutu, sehat, merata dan terjangkau.
- j. Peningkatan pemerataan kondisi infrastruktur dan lingkungan bagi kehidupan masyarakat yang sehat dan nyaman.
- k. Tingginya tuntutan profesionalisme kinerja aparat pemerintah dalam pelayanan masyarakat.

3.5. Rumusan Perubahan, Kecenderungan Masa Depan yang Berpengaruh Pada Tupoksi SKPD.

Berdasarkan rumusan, permasalahan strategis yang dihadapi masa kini, diperlukan beberapa rumusan perubahan untuk mencapai tujuan pada lima tahun yang akan datang.

- a. Tugas Pokok dan Fungsi kecamatan perlu penyesuaian karena merupakan SKPD sebagaimana tercantum dalam UU No. 32 Tahun 2004;
- b. Perlu adanya beberapa perubahan berkaitan dengan kewenangan;
- c. Perlu pemahaman bersama kewenangan yang diberikan kepada kecamatan khususnya oleh SKPD terkait;
- d. Penyesuaian anggaran berdasarkan pedoman pengelolaan keuangan daerah yang baru

3.6. Rumusan Perubahan Internal dan Eksternal yang Perlu Dilakukan.

- a. Menambah jumlah pegawai yang berkualitas sesuai keahliannya;
- b. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan sesuai bidang tugasnya;
- c. Menambah jumlah anggaran sesuai Peraturan Perundangan yang berlaku;
- d. Meningkatkan tingkat pendapatan dan daya beli masyarakat;
- e. Peraturan Perundangan yang mendukung visi dan misi tidak berubah-ubah;
- f. Menjadikan Kecamatan sebagai SKPD murni

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. Visi Kecamatan Karanganyar

Visi merupakan citra, nilai, arah dan tujuan yang akan memandu masa depan organisasi. Dengan kata lain visi merupakan suatu gambaran ideal yang diinginkan dicapai di masa mendatang yang ingin diwujudkan oleh instansi pemerintah. Dengan kondisi ideal yang diwujudkan, visi harus bermakna komprehensif yang meliputi hal-hal yang paling ideal yang dapat diperankan oleh instansi yang bersangkutan. Pada hakekatnya penyusunan visi organisasi adalah menggali gambaran bersama mengenai masa depan berupa komitmen moral tanpa adanya rasa terpaksa. Dengan demikian visi harus menjadi milik bersama dan diyakini seluruh anggota organisasi.

Berdasarkan pengertian dimaksud serta didasari oleh potensi kecamatan, visi dan misi Kabupaten Purbalingga serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purbalingga 2010-2015 maka visi Kecamatan Karanganyar adalah **“Terwujudnya Pelayanan dan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan yang baik dan berkualitas”**.

4.2. Misi

Untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan, maka setiap organisasi harus mempunyai misi yang jelas. Pernyataan misi mengidentifikasi apa, dan untuk siapa organisasi, serta produk maupun jasa apa yang dihasilkan. Agar visi yang telah dirumuskan dapat secara bertahap diaplikasikan, maka perumusan misi merupakan suatu hal yang sangat penting untuk mengarahkan operasionalisasi sehingga dapat terus eksis dan mengikuti tuntutan perkembangan atau perubahan yang terjadi.

Pada dasarnya misi adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh setiap organisasi pemerintah agar tujuan organisasi dapat diwujudkan dengan sebaik – baiknya. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi / pegawai dan pihak yang berkepentingan dapat mengenal secara jelas instansi pemerintah dengan peran dan program – programnya serta hasil yang diharapkan dapat diperoleh di masa yang akan datang.

Oleh karena merupakan penentu arah tindakan operasional organisasi, maka perumusan misi perlu mempertimbangkan tugas pokok dan fungsi organisasi, pihak tertentu yang terkait dengan kegiatan organisasi, demikian pula berbagai masalah yang harus ditangani.

Dengan demikian misi yang telah dirumuskan dapat menjadi alat bagi setiap unsure pimpinan dalam organisasi dalam melakukan ukuran kinerja, standar evaluasi dan sekaligus pemberi arah dan petunjuk kegiatan dalam bentuk Rencana Strategis (RENSTRA) organisasi.

Dengan bertitik tolak pada pengertian misi seperti tersebut di atas, maka secara rinci dikemukakan rumusan misi adalah sebagai berikut :

- a Melaksanakan pengelolaan administrasi dengan tertib.
- b Melaksanakan pembinaan aparatur dengan baik.
- c Melaksanakan pelayanan umum dengan baik.
- d Melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan dengan baik.
- e Melaksanakan koordinasi yang intensif dengan pihak-pihak terkait di kecamatan.

4.3. Tujuan

Penetapan tujuan didasarkan kepada faktor – faktor lingkungan strategis sesuai tugas dan fungsi Kantor Kecamatan Karanganyar. Tujuan adalah hasil akhir yang akan dicapai dalam jangka waktu tertentu dan menggambarkan arah strategis dan perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan. Berdasarkan uraian tersebut, penjabaran visi Kecamatan Karanganyar yang lebih spesifik dan terukur sebagai upaya mewujudkan visi dan misi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Purbalingga, maka tujuan Kecamatan Karanganyar adalah sebagai berikut :

- a. Terwujudnya pengelolaan administrasi yang tertib
- b. Terlaksananya pembinaan aparatur dengan baik.
- c. Terlaksananya pelayanan umum dengan baik.
- d. Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan dengan baik.
- e. Terciptanya koordinasi yang intensif dengan pihak-pihak terkait di kecamatan.

Pengertian sasaran organisasi adalah pernyataan tentang hal-hal yang diharapkan oleh setiap unit organisasi dalam peranannya terhadap pencapaian visi dan misi organisasi yang telah ditetapkan. Berdasarkan uraian tersebut, maka sasaran dalam rencana strategis Kantor Kecamatan Karanganyar adalah sebagai berikut :

- a. Terwujudnya administrasi yang tertib
- b. Terwujudnya perlengkapan kantor yang baik
- c. Terwujudnya aparatur yang profesional di bidangnya
- d. Terwujudnya pelayanan umum yang berkualitas
- e. Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan
- f. Terwujudnya koordinasi dengan intensif

4.4. Strategi

Strategi pada hakikatnya menjelaskan pemikiran-pemikiran secara konseptual, kualitas, rasional, realistis dan komprehensif tentang langkah-langkah yang diperlukan untuk memperlancar atau mempercepat pencapaian visi, misi dan tujuan yang telah ditetapkan. Berdasarkan uraian tersebut maka strategi Kecamatan Karanganyar sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur pengelola administrasi dan pelayanan publik.
- b. Mengoptimalkan kinerja aparatur pemerintah Kecamatan Karanganyar.
- c. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung, profesionalisme dan kesejahteraan aparatur kecamatan.
- d. Menciptakan kondisi keamanan, ketentraman dan ketertiban yang kondusif.
- e. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
- f. Membangun sistem dan mekanisme perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pembangunan sosial, ekonomi dan infrastruktur di wilayah kecamatan.
- g. Menumbuh kembangkan kebersamaan dan kreatifitas masyarakat
- h. Penyediaan sarana dan prasarana pada setiap bidang pembangunan.
- i. Melaksanakan pembinaan secara kontinue dan koordinasi yang efektif dan efisien pada tingkat Kecamatan Karanganyar.

4.5. Kebijakan

Untuk mencapai sasaran maka diperlukan suatu intervensi dalam bentuk kebijakan organisasi. Kebijakan yang dimaksud merupakan suatu dasar atau pedoman bagi pelaksanaan suatu program dan kegiatan. Salah satu unsur penting dalam menetapkan unsur kebijakan adalah tidak hanya baik secara konsep melainkan dapat dilaksanakan secara konsisten, sistematis dan berkesinambungan.

Penetapan kebijakan sebagai suatu cara untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam Renstra Kantor Kecamatan Karanganyar disusun dengan tetap memperhatikan program Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Purbalingga Tahun 2010-2015 yang relevan dengan kelembagaan Kantor Kecamatan Karanganyar. Dalam kaitannya dengan Renstra Kantor Kecamatan Karanganyar, maka kebijakan yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

- a. Penguatan kapasitas aparatur kecamatan dalam pengelolaan administrasi.
- b. Penguatan kapasitas aparatur kecamatan dalam pengelolaan perlengkapan
- c. Penguatan kapasitas aparatur kecamatan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
- d. Penguatan kapasitas aparatur kecamatan dalam pemberian pelayanan publik
- e. Pemberdayaan sistem kelembagaan dan kompetensi aparatur Kecamatan Karanganyar dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan
- f. Pembangunan komunikasi / koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan yang lebih berkualitas baik ditingkat desa, kecamatan maupun kabupaten untuk menjamin integrasi konsistensi dan sinkronisasi dalam pelaksanaannya di wilayah kecamatan.

BAB V

PERENCANAAN STRATEGIS

Dalam rangka sinkronisasi visi, misi, tujuan, strategi dan kebijakan yang dimiliki Kecamatan Karanganyar dengan RPJMD Kabupaten Purbalingga maka ditetapkan Perencanaan strategis Kecamatan Karanganyar sebagai berikut .:

BAB VI
P E N U T U P

Rencana Strategis Kecamatan Karanganyar Tahun 2010-2015 disusun berdasarkan visi misi kecamatan yang dalam penyusunan program dan kegiatan diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purbalingga Tahun 2010-2015. Renstra kecamatan dalam tiap tahunnya dijabarkan dalam rencana kerja sesuai dengan kebijakan umum anggaran Kabupaten Purbalingga. Untuk tercapainya kondisi yang diharapkan pada tahun 2015, maka peran serta masyarakat dan seluruh *stake holder* mutlak diperlukan dalam kerangka pembangunan Kecamatan Karanganyar yang merupakan bagian dari pembangunan Kabupaten Purbalingga.

Mudah - mudahan Rencana Strategi Kecamatan Karanganyar Tahun 2010-2015 dapat terwujud sesuai harapan serta senantiasa Allah SWT meridhoi setiap langkah yang kita laksanakan. Amin....

Karanganyar, Nopember 2011

CAMAT KARANGANYAR

DJUMARNO,S.E.

Pembina

NIP 195711011986071001